

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIMAHI



2016



Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2016

<https://cimahikota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2016

ISSN : -
Nomor Publikasi : 3277
Katalog BPS :
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xi + 82 halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Cover : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2016

Tim penyusun

Pengarah : Drs Erwan Syahriza

Penanggung Jawab : Dra Tien Trina Sulistiawati

Naskah :
1. Dra Tien Trina Sulistiawati
2. Windi Pramudyawardani, S.ST
3. Cahyadi, SIP

Cover Luar : Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kota
Cimahi

Penyunting :
1. Drs Erwan Syahriza
2. Dra Tien Trina Sulistiawati

<https://cimahikota.bps.go.id>

Halaman Kosong

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2016 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi tahun 2016. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2016, Sakernas, dan proyeksi Penduduk 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Cimahi, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi

Erwan Syahriza

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	5
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .	6
1.4 Fertilitas	9
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	9
1.6 Penggunaan Alat/cara KB	11
2. Kesehatan dan Gizi	13
2.1 Derajat dan Status kesehatan penduduk	13
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	16
2.3 Pemanfaatan Fasilitas tenaga Kesehatan	19
3. Pendidikan	23
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	23
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah..	25
3.3 Tingkat Pendidikan	26
3.4 Partisipasi Sekolah (APM dan APK)	27

4.	Ketenagakerjaan	31
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	32
4.2	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	36
4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	41
4.4	Sektor Formal dan Sektor Informal	45
5.	Taraf dan Pola Konsumsi	49
6.	Perumahan dan Lingkungan	55
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	56
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	59
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	61
7.	Kemiskinan	63
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin	65
7.2	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	66
7.3	Karakteristik Pendidikan	68
7.4	Karakteristik Ketenagakerjaan	70
7.5	Karakteristik Perumahan	72
7.6	Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin	74
8.	Sosial Lainnya	75
8.1	Perjalanan Wisata	76
8.2	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	77
8.3	Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis	79
8.4	Tindak Kejahatan	81

Daftar Tabel

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016	4
Tabel 1.2 Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016	6
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2015-2016	15
Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit dan Rata-rata Lama Sakit (hari) di Kota Cimahi, 2015-2016	16
Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2016	21
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2016	24
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2016	29
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2016	30
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2014 – 2015	39

Tabel 4.2	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	41
Tabel 4.3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	46
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016	50
Tabel 5.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Kelompok Makanan Sebulan Menurut Sub Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016	52
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan, 2015 dan 2016	56
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2015 -2016	59
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015 -2016	62
Tabel 7.1	Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kota Cimahi, 2016	74
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2015 dan 2016	79
Tabel 8.4	Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, 2015 dan 2016	81

Daftar Grafik

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2012-2016	2
Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi, 2016	3
Grafik 1.3 Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2016	7
Grafik 1.4 Angka Beban Ketergantungan di Kota Cimahi, 2016	8
Grafik 1.5 Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Cimahi, 2015-2016	10
Grafik 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2015-2016	12
Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2012-2016	14
Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama Menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2016	17
Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2015-2016	18
Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2016	20

Grafik 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2011-2016	25
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2016	27
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2015-2016	28
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja Di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	33
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2016	34
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	35
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	36
Grafik 4.5	Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, Agustus 2014-2015	37
Grafik 4.6	Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, Agustus 2015	40
Grafik 4.7	Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Perkotaan Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 .	42
Grafik 4.8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015 ..	43
Grafik 4.9	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015	44
Grafik 4.10	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Status Kegiatan Formal Informal di Kota Cimahi, Agustus 2015	47
Grafik 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016	51
Grafik 5.2	Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2012 – 2016	53
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2015 dan 2016	58

Grafik 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2010-2016	65
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2010 – 2016	66
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi 2010 - 2016	67
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2013 - 2016	68
Grafik 7.5	Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2015 – 2016	69
Grafik 7.6	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2015 – 2016	70
Grafik 7.7	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2015 – 2016	71
Grafik 7.8	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Perkapita di Kota Cimahi, Tahun 2015	72
Grafik 8.1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan, Tahun 2016	76
Grafik 8.2	Persentase Penduduk yang Melakukan Kegiatan Bepergian Menurut Maksud Utama Melakukan Bepergian Tahun 2016	77
Grafik 8.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN Tahun 2016	78
Grafik 8.4	Persentase penduduk Menjadi Korban Kejahatan Sejak Maret 2014 – Februari 2016	82

1. Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2020, jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 594.021 jiwa pada tahun 2016.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Jumlah

penduduk Kota Cimahi tahun 2016 adalah 594 021 jiwa (proyeksi BPS). Dengan penduduk yang besar maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan penduduknya baik material maupun rohaniannya. Masalah-masalah lain akan timbul seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

**Grafik 1.1. Jumlah Penduduk di Kota Cimahi
Tahun 2012-2016**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 562.721 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen pada tahun 2016 atau dengan kata lain mengalami penambahan

sebanyak 7.441 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 594.021 jiwa pada tahun 2016 tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 258.203 jiwa, kecamatan Cimahi tengah sebanyak 172.366 jiwa dan Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 163.462 jiwa.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2012 hingga tahun 2016, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,27 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,54 persen mengalami penurunan menjadi 0,24 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi, 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016 secara umum juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 3 kecamatan yang ada di Kota Cimahi terdapat 2 kecamatan yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara. Sedangkan 1 kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah.

Tabel 1.1. Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cianjur	0,59	0,52	0,45	0,38	0,32
Kabupaten Tasikmalaya	0,64	0,57	0,49	0,43	0,36
Kota Bandung	0,63	0,57	0,50	0,43	0,37
Kota Tasikmalaya	0,61	0,54	0,48	0,41	0,32
Kota Banjar	0,62	0,56	0,45	0,50	0,28

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Apabila ditelaah lebih lanjut di Kota Cimahi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi selaras dengan jumlah penduduknya juga banyak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Cimahi bagaimana

menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut supaya tidak menjadi masalah yang semakin besar di kemudian harinya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Jawa Barat maka laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tergolong sedang. (Tabel 1.1)

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Apabila kita lihat sebaran penduduk di kecamatan di Kota Cimahi, terlihat bahwa penduduk Kota Cimahi terpusat di 1 kecamatan yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di Kecamatan di Kota Cimahi, terlihat di wilayah 1 kecamatan lebih padat dibanding kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Dari Tabel 1.2 terlihat 3 kecamatan dengan kepadatan penduduk 14.777 jiwa per km². Kecamatan Cimahi Selatan dengan jumlah penduduk 258 203 Jiwa dengan kepadatan penduduk 15 278 jiwa per km², Kecamatan Cimahi Tengah dengan jumlah penduduk 172 366 orang lebih kecil dari jumlah penduduk kecamatan Cimahi Selatan tetapi menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan mencapai 17.236 jiwa per km²., sementara kecamatan Cimahi Utara dengan jumlah penduduk 163 452 orang mempunyai tingkat kepadatan terendah yaitu 12.289 jiwa per km².

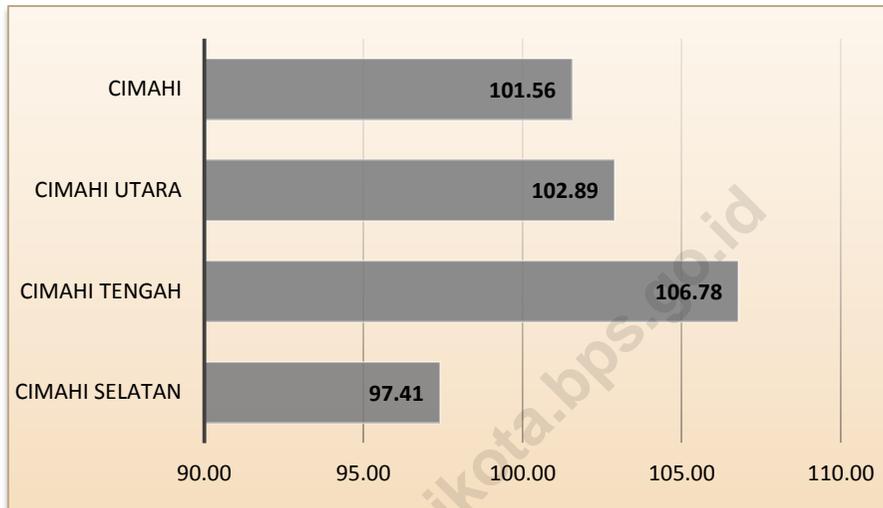
Tabel 1.2. Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	43,47	15 278
2.	Cimahi Tengah	29,01	17 236
3.	Cimahi Utara	27,52	12 290
Kota Cimahi		100,00	14 777

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 1.3. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2016

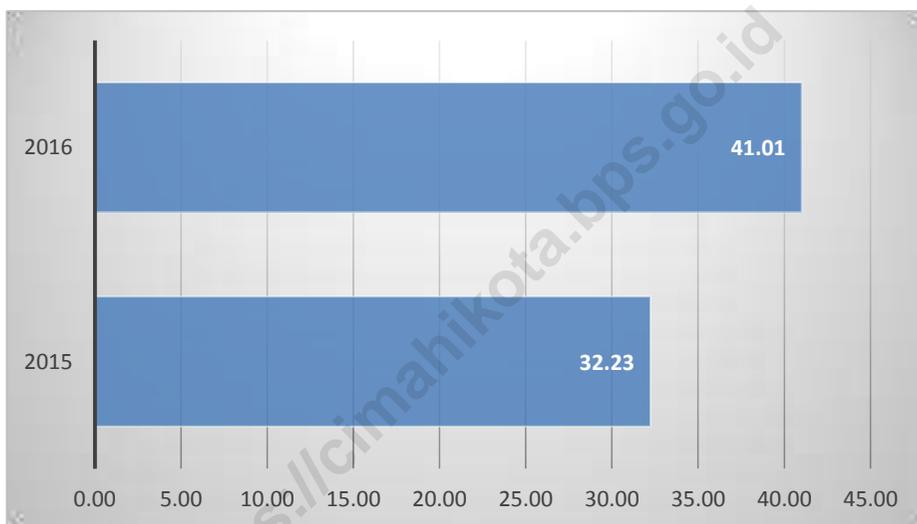
Sumber : Susenas, Maret 2016

Komposisi penduduk Kota Cimahi jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2016 sebesar 101,56. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin perkecamatan di Kota Cimahi, maka dari 3 Kecamatan terdapat 1 Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu Rasio jenis kelamin terkecil pada Kecamatan Cimahi selatan dengan rasio jenis kelamin sebesar 97,41. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kecamatan tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk

usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Grafik1.4. Angka Beban Ketergantungan di Kota Cimahi, 2016



Sumber : Susenas, Maret 2016

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2016 sebesar 41,01. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 41 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

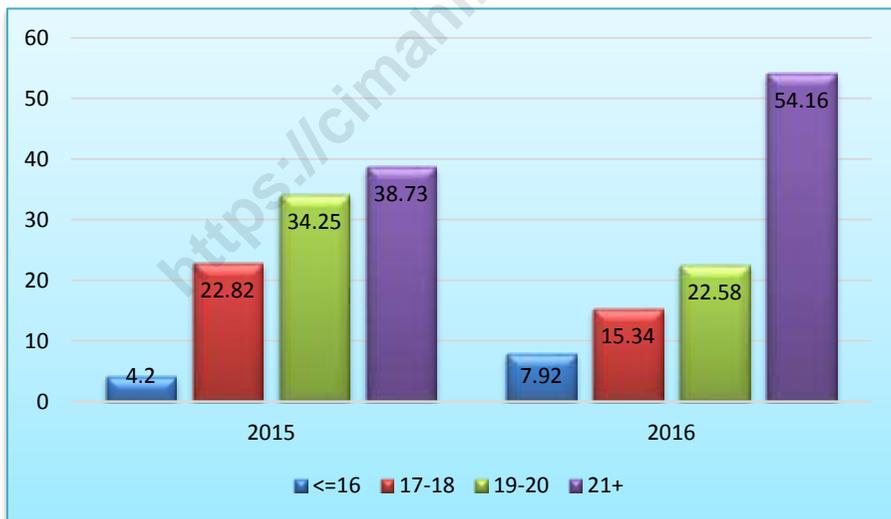
Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik1.5. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Cimahi, 2015-2016



Sumber : Susenas, Maret 2016

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016, sebagian besar wanita di Kota Cimahi melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 54,16 persen, pada tahun sebelumnya yang paling banyak

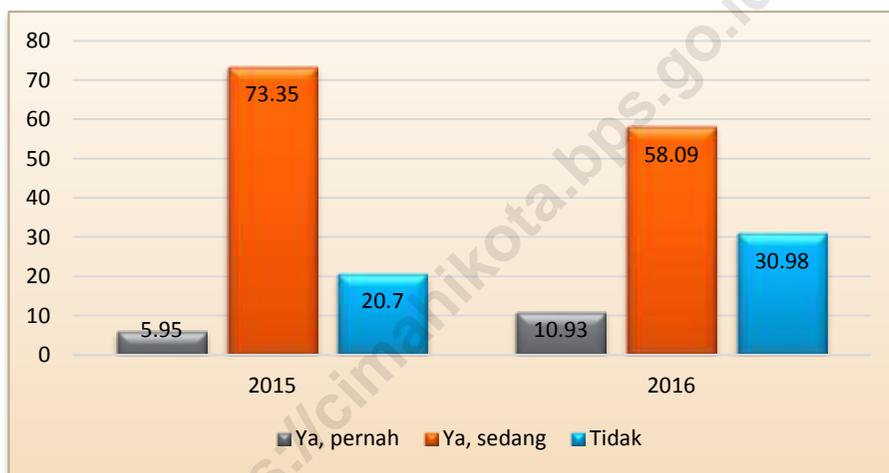
wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 38,73 persen.

Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Persentase wanita Kota Cimahi berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 4,20 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,92 persen. Padahal pada usia 10-16 tahun tersebut seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Grafik 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2015-2016



Sumber : Susenas, Maret 2016

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016 di Kota Cimahi, penggunaan alat KB oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin digunakan oleh 58,09 persen. Sementara yang tidak pernah menggunakan 30,98 persen dan yang pernah menggunakan 10,93 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya persentase wanita yang menggunakan alat KB lebih banyak yaitu 73,35 persen.

2. Kesehatan & Gizi

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

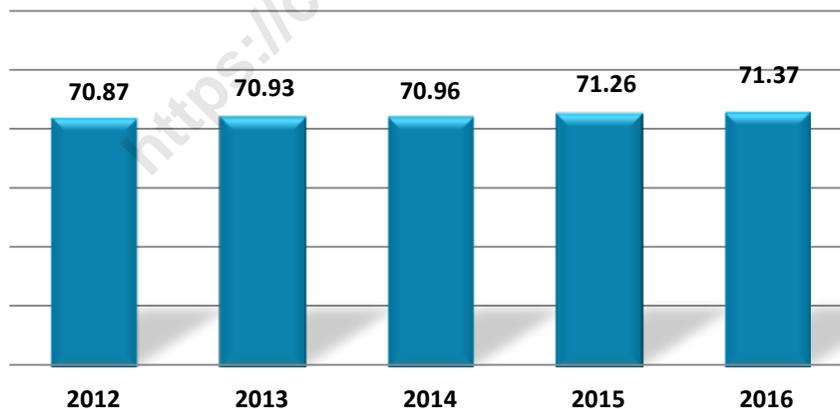
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di suatu wilayah merupakan salah satu rujukan melihat tingkat kesehatan di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menurunkan Angka kematian Bayi dan Balita, tidak hanya terfokus pada kewajiban pemerintah saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat

mengenai kesehatan sangatlah penting, khususnya pengetahuan ibu dalam merawat bayi dan balitanya.

Dimensi kesehatan tidak hanya Angka Kematian Bayi dan Balita, tetapi juga bisa dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2014 hingga 2016, Kota Cimahi telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,4 tahun. Pada tahun 2014, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Cimahi hanya sebesar 70,96 tahun, dan pada tahun 2016 telah mencapai 71,37 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cimahi mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2012-2016



Sumber : IPM, 2016

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan

semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Persentase penduduk Kota Cimahi yang menderita sakit pada tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,42 persen, padahal sebelumnya hanya sebesar 17,88 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit baik laki-laki maupun perempuan hampir sama besar. Penduduk laki-laki yang menderita sakit sebesar 50,36 persen dan penduduk perempuan sebesar 52,44 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2015-2016

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2015	17,22	82,78	18,55	81,45	17,88	82,12
2016	50,36	49,64	52,44	47,56	51,42	48,58

Sumber : Susenas, Maret 2016

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan yang dialami penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6,75 hari. Penduduk di Kota Cimahi paling banyak mengalami sakit selama 1 sampai 3 hari yaitu sebesar 38,06 persen pada tahun 2016. Sementara persentase yang mengalami sakit selama 4 sampai 7 hari sebanyak 45,50 persen. Penduduk yang mengalami sakit

selama 22 sampai 30 hari pada tahun 2016 hal ini persentasenya cukup besar yaitu 6,12 persen menggambarkan bahwa semakin lama jumlah hari sakit maka penyakit yang dialami semakin serius.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit dan Rata-rata Lama Sakit (hari) di Kota Cimahi, 2015-2016

No	Tahun	Jumlah hari sakit (Persen)					Rata-rata lama sakit (hari)
		≤ 3	4-7	8-14	15 - 21	22 - 30	
1	2015	42,19	39,65	7,20	2,48	8,47	7,25
2	2016	38,06	45,50	7,97	2,35	6,12	6,75

Sumber : Susenas, Maret 2016

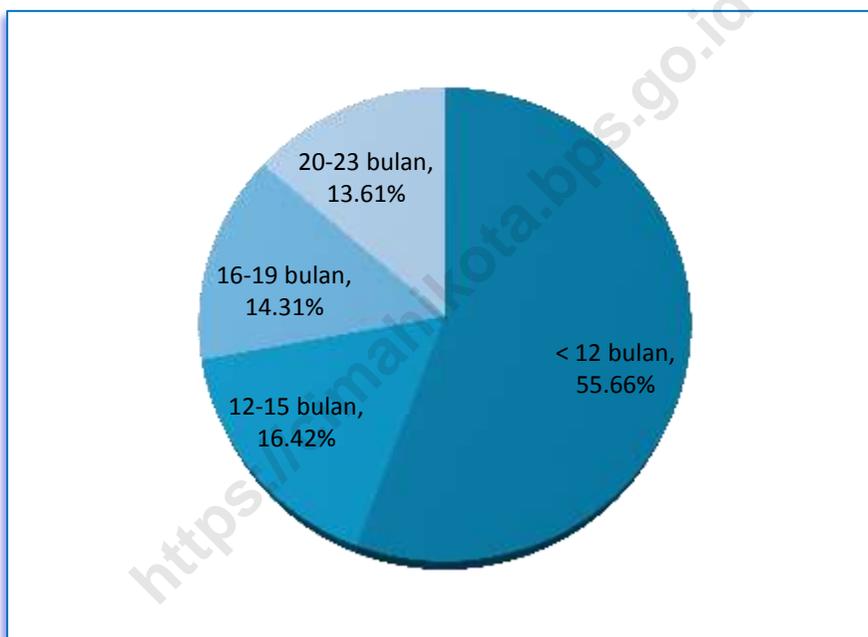
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik

dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2016



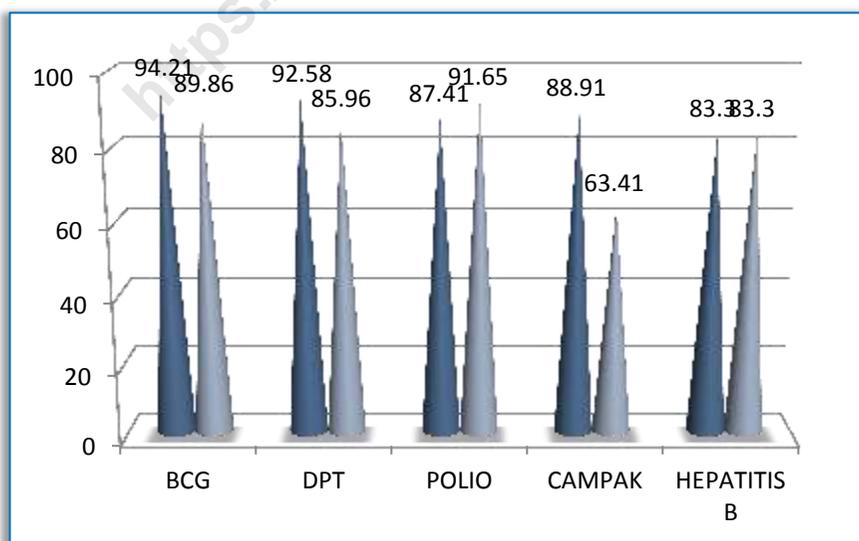
Sumber: Susenas Maret 2016

Sangat dianjurkan seorang ibu dapat menyusui selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan yang lebih kuat pada bayi. Di Kota Cimahi pada tahun 2016, rata-rata lama bayi disusui selama 10 bulan. Persentase paling besar yaitu anak yang disusui sampe 12 bulan atau 1 tahun, yaitu sebesar 55,66 persen, kemudian yang disusui selama 12 hingga 15 bulan sebesar 16,42 persen, sedangkan

yang disusui selama 16-19 bulan dan 20-23 bulan masing-masing sebesar 14,31 persen dan 13,61 persen.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Tyfus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2015-2016



Sumber: Susenas Maret 2016

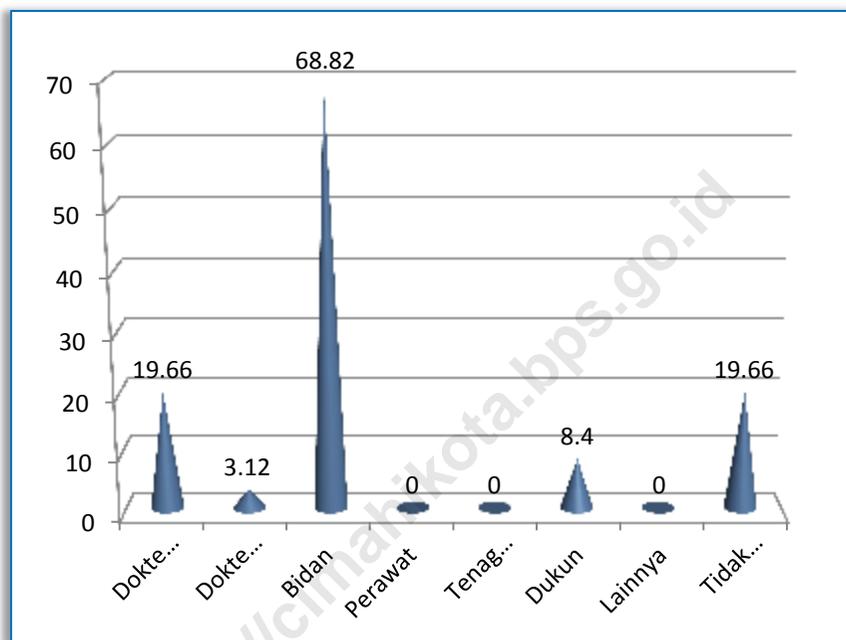
Berdasarkan hasil Susenas 2016, Hampir semua balita yang ada di Kota Cimahi pernah mendapatkan imunisasi wajib, hal ini terlihat dari Grafik 2.3 di atas, bahwa lebih dari 60 persen balita mendapat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pada tahun 2016 persentase terbesar adalah imunisasi polio sebesar 91,65 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas tenaga kesehatan sangatlah penting, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting karena bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Secara umum dilihat dua tahun terakhir, di Kota Cimahi persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan, yaitu lebih dari 68,82 persen. Sementara itu proses kelahirannya dibantu oleh dokter kandungan pada tahun 2016 sebesar 19,66 persen.

Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2016



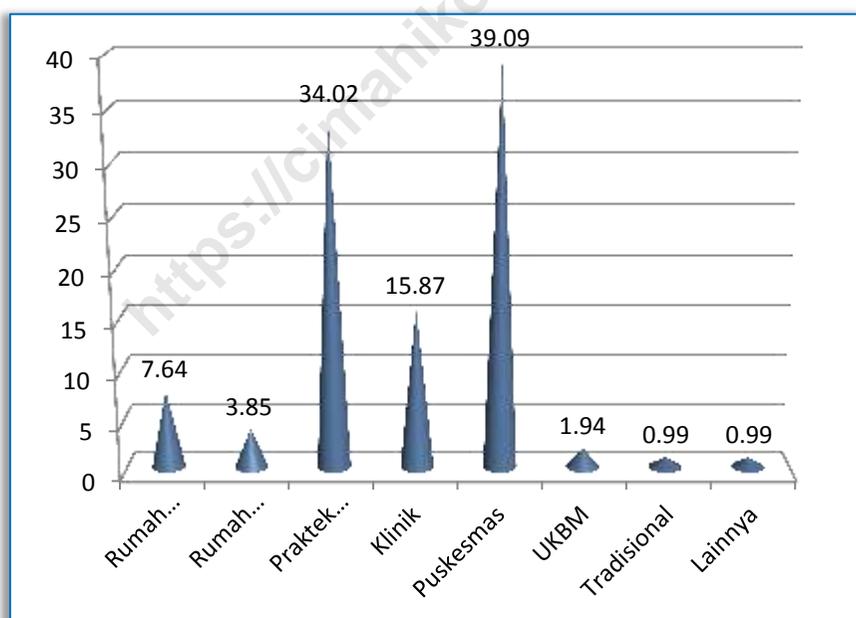
Sumber : Susenas, Maret 2016

Di Kota Cimahi penolong kelahiran oleh dukun beranak/paraji masih cukup besar yaitu kisaran 8,4 persen, hal ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan ibu, faktor budaya dan faktor ekonomi keluarga.

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Menurut data Susenas 2016 yang diperoleh, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM, dan praktek pengobatan tradisional. Dari beberapa tempat berobat tersebut, di Kota Cimahi persentase terbesar penduduk berobat di puskesmas yaitu sebesar 39,09 persen, kemudian diikuti oleh praktek dokter/bidan sebesar 34,02 persen.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

3. Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber

daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2016 persentasenya sangat besar yaitu 98,43 persen.

Apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan, penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis sebesar 98,85 persen dan perempuan sebesar 98,02 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi yang bisa membaca dan menulis huruf arab juga sangat besar yaitu sebesar 89,68 persen laki-laki dan sebesar 87,97 persen perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2016

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Laki-laki	98.85	89.68	8.51	0.43
2 Perempuan	98.02	87.97	7.45	1.19
Total	98.43	88.82	7.97	0.82

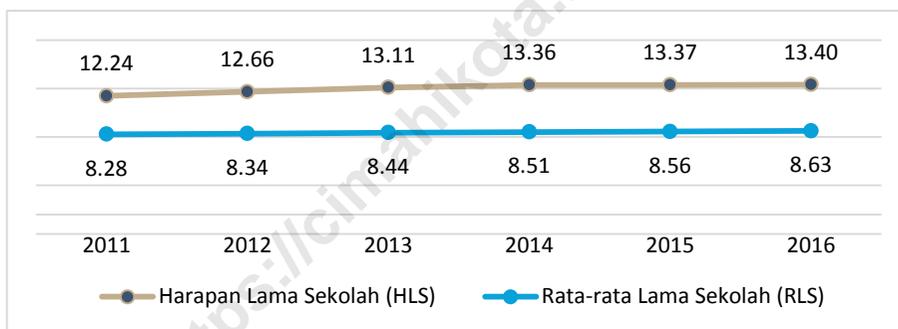
Sumber : Susenas, Maret 2016

Berdasarkan data hasil Susenas 2016, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi yang buta huruf sebesar 0,82 persen, perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 1,19 persen perempuan dan 0,43 persen laki-laki.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah meningkat sebesar 1,16 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,35 tahun.

Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2011-2016



Sumber : IPM, 2016

Selama periode 2011 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,40 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2.

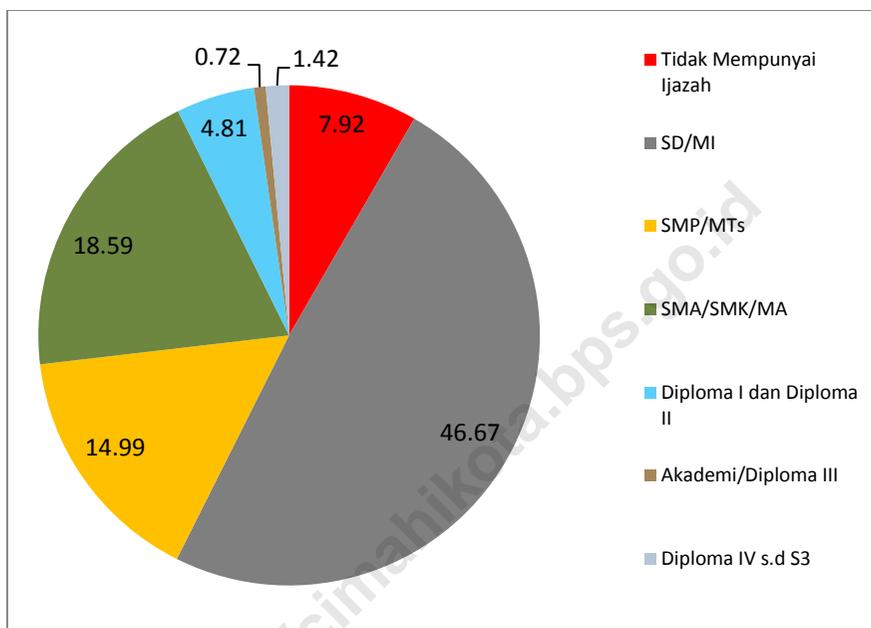
Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2011 hingga 2016. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas II (Grafik3.2).

3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas Sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data hasil Susenas 2016, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SD/Sederajat atau bisa dikatakan tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 46,67 persen, kemudian SMA/Sederajat yaitu sebesar 18,59 persen dan SMP/Sederajat sebesar 14,99 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2016



Sumber : Susenas, Maret 2016

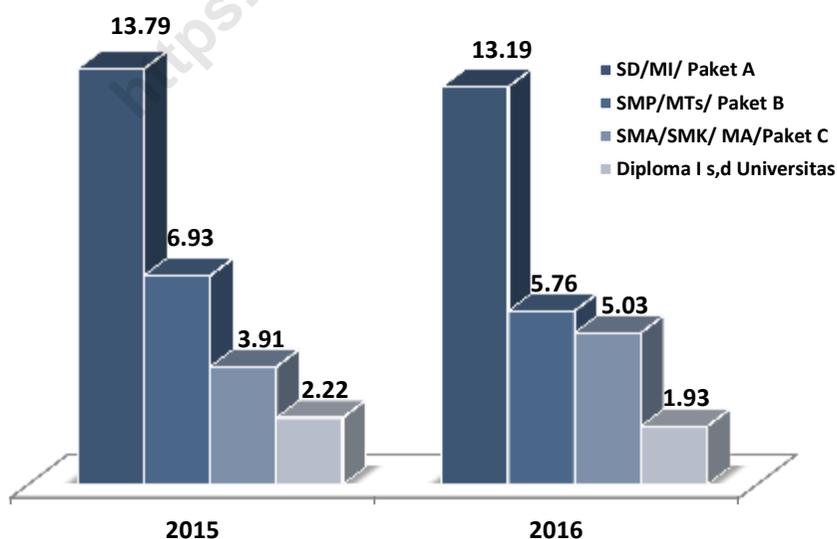
3.4 Partisipasi Sekolah (APM dan APK)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Untuk penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih bersekolah pada dua tahun terakhir di Kota Cimahi persentase terbesar juga pada tingkat setara SD yaitu sebesar 13,79 persen pada tahun 2015 dan 13,19 persen pada tahun 2016. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat Diploma I/ Universitas persentasenya paling kecil yaitu sebesar 2,22 persen pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 1,93 persen pada tahun 2016.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2015-2016



Sumber : Susenas, Maret 2016

Jika kita lihat berdasarkan jenis kelamin pada rentang usia sekolah yaitu kelompok umur 7 – 24 tahun, penduduk yang masih sekolah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi untuk perempuan masih ada yang tidak/belum pernah bersekolah pada rentang usia 19 – 24 tahun. Secara umum, pada usia sekolah penduduk yang masih bersekolah sebanyak 72,99 persen, 26,84 persen tidak bersekolah lagi dan 0,17 persen tidak/belum pernah sekolah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2016

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
7–12	-	99.4	0.6
13–15	-	92.71	7.29
16–18	-	63.76	36.24
19–24	-	32.09	67.91
7–24	-	72.53	27.47
Perempuan			
7–12	-	99.35	0.65
13–15	-	96.84	3.16
16–18	-	76.82	23.18
19–24	1.2	21.16	77.64
7–24	0.32	73.45	26.23
Total			
7–12	-	99.37	0.63
13–15	-	94.77	5.23
16–18	-	71.44	28.56
19–24	0.57	26.91	72.52
7–24	0.17	72.99	26.84

Sumber : Susenas, Maret 2016

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS perempuan lebih tinggi daripada laki-laki untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun, APS perempuan di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,84 persen dan laki-laki sebesar 92,71 persen dan pada kelompok umur 16-18 tahun APS perempuan sebesar 76,82 dan APS laki-laki sebesar 63,76 persen. Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS laki-laki sedikit lebih tinggi daripada APS perempuan, yaitu sebesar 99,4 persen APS laki-laki dan 99,35 persen APS perempuan. Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan seberapa besar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, semakin kecil perbedaan APS maka semakin meratanya pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kota Cimahi APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2016**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/MI Sederajat	98.63	105.44
SMP/MTs Sederajat	79.71	88.93
SMA/SMK/MA Sederajat	63.29	89.02

Sumber : Susenas, Maret 2016

4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2014 dan 2015 kondisi Agustus, sedangkan data tahun 2016 tidak tersedia karena survei tidak dilaksanakan. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk

yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

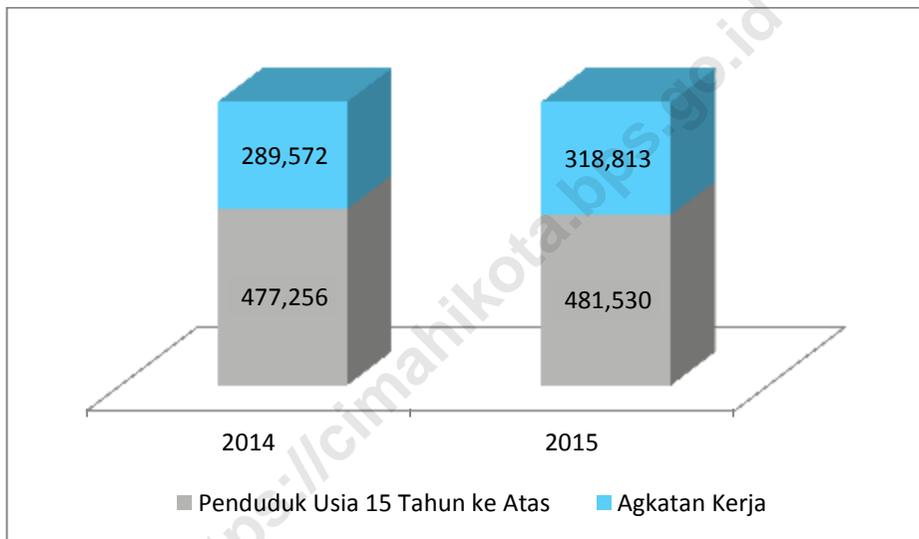
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi Agustus 2015 sebanyak 481.530 orang, bertambah sebanyak 4.274 orang dibandingkan Agustus 2014. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia

kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2015 mencapai 318.813 orang, bertambah sebanyak 29.241 orang dibanding Agustus 2014.

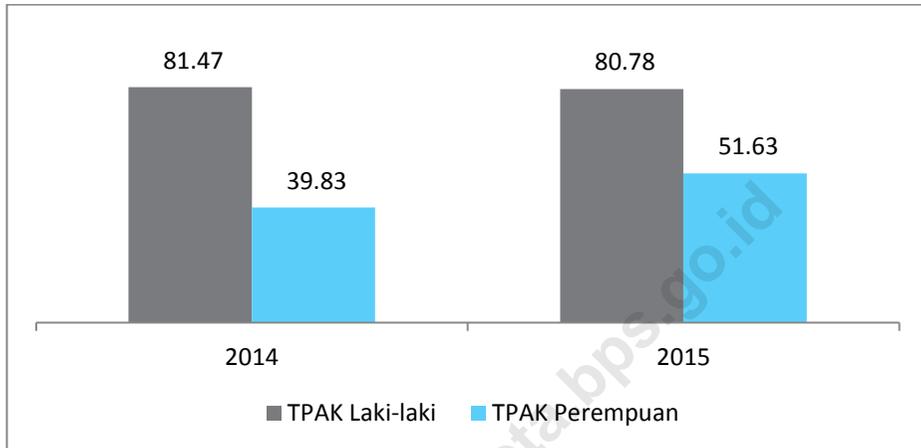
**Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja
di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014 dan 2015

Dari total angkatan kerja sebanyak 318.813 orang pada Agustus 2015, sebanyak 94,54 persennya melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

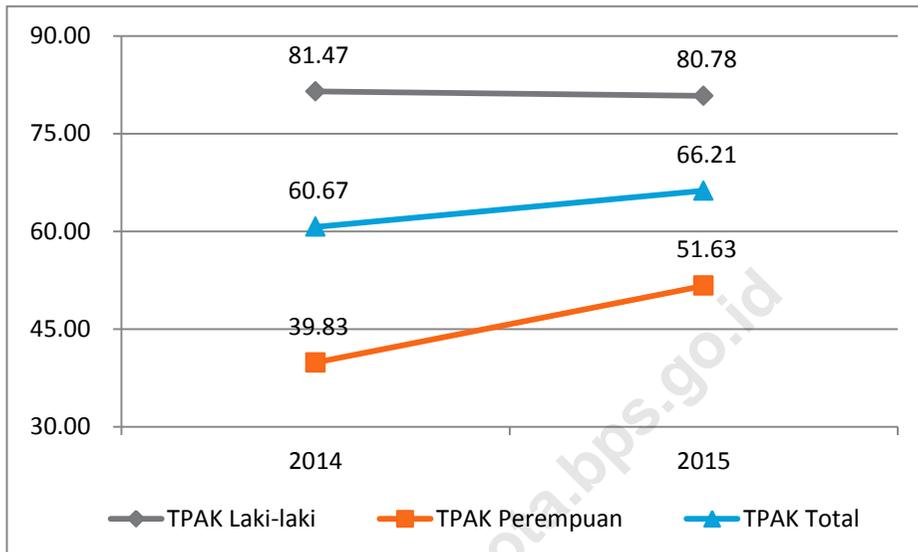
**Grafik 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi,
Agustus 2014 – 2016**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014 dan 2015

Dari jumlah angkatan kerja tersebut TPAK tahun 2015 bergerak naik dibanding tahun 2014. TPAK Kota Cimahi Agustus 2014 sebesar 60,67 persen, sedangkan Agustus 2015 sebesar 66,21 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa baik Agustus 2014 maupun Agustus 2015 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2015 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 80,78 persen sedangkan TPAK perempuan 51,63 persen.

Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015



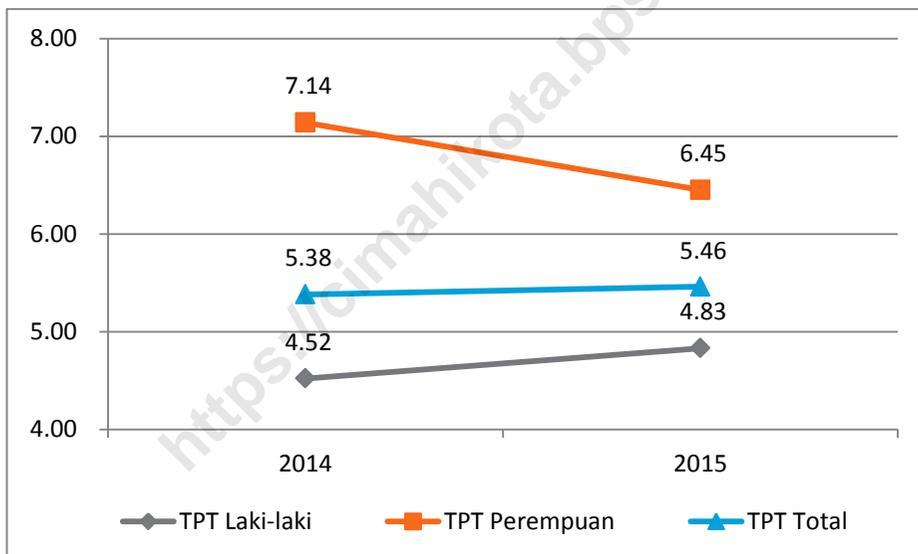
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2014- 2016

Meskipun TPAK Kota Cimahi keadaan Agustus 2015 meningkat dari TPAK Agustus 2014, namun ternyata jumlah penganggur pun ikut meningkat. Jumlah penduduk yang menganggur, baik yang pernah bekerja maupun yang tidak pernah bekerja sebelumnya pada kondisi Agustus 2014 sebanyak 15.571 orang. Sedangkan kondisi Agustus 2015 meningkat menjadi 17.407 orang. Nilai Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Cimahi kondisi Agustus 2014 mencapai 5,38 persen yang kemudian sedikit meningkat pada kondisi Agustus 2015 menjadi 5,46 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penganggur laki-laki kondisi Agustus 2014 di Kota Cimahi sebanyak 8.788 orang yang kemudian bertambah 604 rang menjadi 9.392 orang pada kondisi Agustus 2015. Sedangkan jumlah penganggur perempuan kondisi Agustus 2014 sebanyak

6.783 orang dan kondisi Agustus 2015 meningkat menjadi 8.015 orang. Sedangkan jika dilihat TPT menurut jenis kelamin, TPT perempuan cukup jauh lebih tinggi dari laki-laki. Namun jika dibandingkan kondisi Agustus 2014 dengan Agustus 2015, TPT perempuan turun cukup signifikan dari 7,14 persen menjadi 6,45 persen sedangkan TPT laki-laki sedikit meningkat dari 4,52 persen menjadi 4,83 persen.

Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015



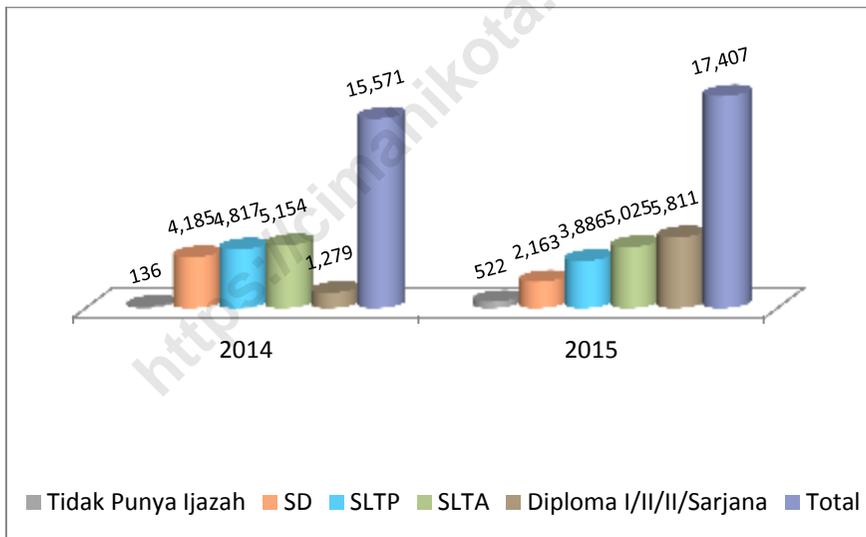
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2014-2015

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang

Ketenagakerjaan akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Grafik 4.5 Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, Agustus 2014-2015



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2014-2015

Jumlah penganggur di Kota Cimahi kondisi Agustus 2015 yang paling banyak adalah berijazah Diploma I/II/II/Sarjana, yaitu mencapai 5.811 orang, padahal pada kondisi Agustus 2014 penganggur terbanyak adalah yang

berijazah SLTA/Sederajat sebanyak 5.154 orang.

Peningkatan jumlah penganggur terlihat pada penduduk yang tidak memiliki ijazah dan yang memiliki ijazah D I/II/III/Sarjana dengan peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk penduduk dengan ijazahSD/ sederajat mengalami penurunan sangat signifikan dari 4.185 orang pada kondisi Agustus 2014 menjadi hanya 2.163 orang pada kondisi Agustus 2015.

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SLTA/ sederajat dan Diploma I/II/II/sarjana merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pemerintah Kota Cimahi telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, meningkat dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Memacu tingkat pendidikan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi positif dalam pembangunan.

Tahun 2016 TPT penduduk yang berijazah SMA Kejuruan mencapai 16,51 persen, mengalami penurunan sebesar 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan dalam periode setahun jumlah tenaga kerja lulusan SMA Kejuruan semakin banyak yang terserap lapangan usaha. Demikian halnya dengan TPT untuk penduduk dengan ijazah SMA umum, pada keadaan Agustus 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Agustus 2015, yaitu dari 12,21 persen menjadi 11,40 persen.

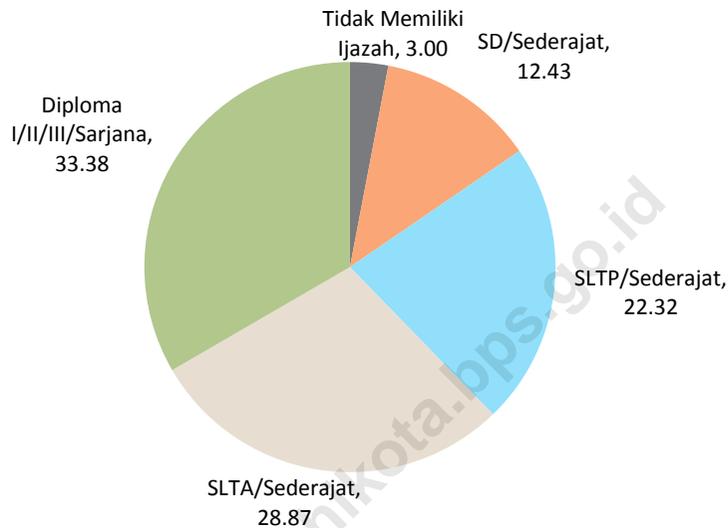
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Cimahi, 2014 – 2015

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Tidak memiliki ijazah	0.73	3.81
SD/ sederajat	2.86	1.75
SLTP/ Sederajat	12.75	6.52
SLTA/ sederajat	8.54	6.65
Diploma I/II/III/Sarjana	4.83	12.47
Total	5.38	5.46

Sumber : Sakernas Agustus 2014 - 2015

Dilihat dari komposisi penganggur menurut ijazah yang dimiliki, penganggur dengan ijazah Diploma I/II/III/Sarjana mencapai 33,38 persen dari total pengangguran terbuka. Penganggur lulusan SLTA/ sederajat juga memegang porsi cukup besar, yaitu mencapai 28,87 persen. Perlu upaya keras dari berbagai pihak melihat fenomena tersebut, dimana idealnya lulusan Diploma I/II/III/Sarjana dan lulusan SLTA/ sederajat akan lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.

Grafik 4.6 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Cimahi, Agustus 2015



Sumber : Sakernas Agustus 2015

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Industri pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel; Jasa kemasyarakatan; dan Lainnya.

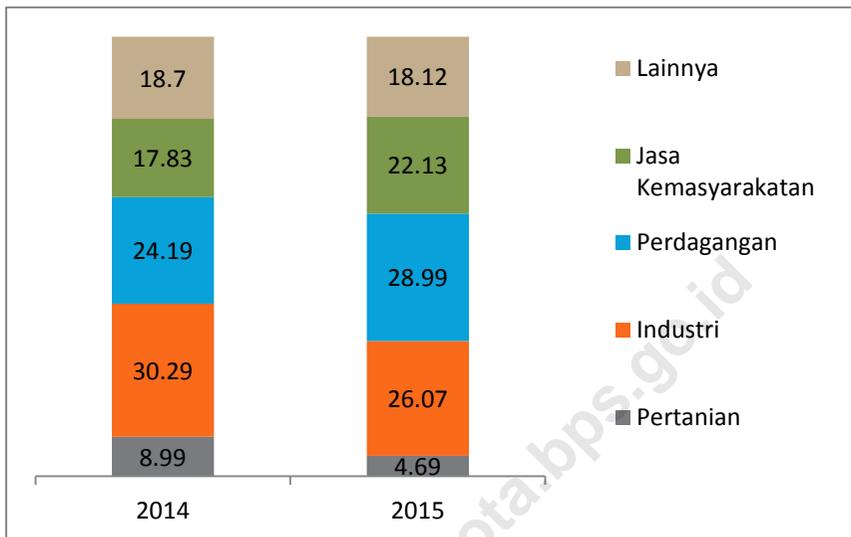
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2015) terlihat bahwa sebanyak 87.388 orang atau sekitar 28,99 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel. Kemudian sebanyak 78.585 orang atau 26,07 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha industri pengolahan.

Tabel 4.2 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2014 - 2015

Lapangan Usaha	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	24,619	14,128
Industri Pengolahan	83,002	78,585
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	66,277	87,388
Jasa Kemasyarakatan	48,865	66,700
Lainnya	51,238	54,605
Total	274,001	301,406

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014-2015

**Grafik 4.7 Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Perkotaan
Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014-2015

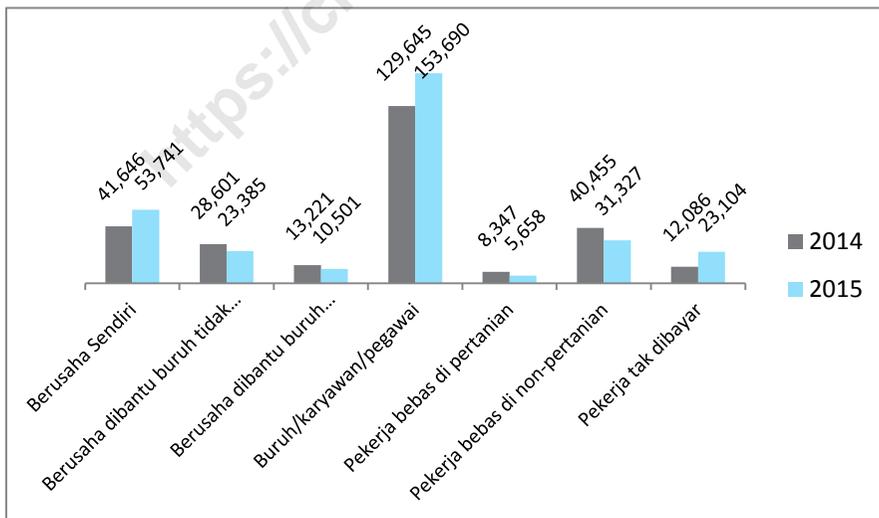
Jumlah pekerja yang terserap pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan pada Agustus 2015 mencapai 66.700 orang atau sebesar 22,13 persen yang meningkat cukup besar dari kondisi tahun sebelumnya. Hal sama juga terjadi pada lapangan usaha perdagangan dimana pada kondisi Agustus 2014 menyerap tenaga kerja 66.277 orang atau 24,19 persen menjadi 87.388 orang atau 28,99 persen pada tahun 2015. Peningkatan penyerapan tenaga kerja perdagangan dan jasa-jasa menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi wilayah Kota Cimahi. Perekonomian bergeser dari pertanian dan industri ke lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa. Hal ini terlihat dari turunnya daya serap tenaga kerja dari lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian.

Keadaan Agustus 2015 daya serap lapangan usaha industri pengolahan mencapai 78.585 orang atau sekitar 26,07 persen, sedangkan

kondisi Agustus 2014 sebanyak 83.002 orang atau menyerap 30,29 persen tenaga kerja. Hal yang sama pada lapangan usaha pertanian yang menurun dari 24.619 orang atau 8,99 persen tenaga kerja yang diserap pada kondisi Agustus 2014 menjadi 14.128 orang atau 4,69 persen pada kondisi Agustus 2015.

Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang beralih dari lapangan usaha pertanian dan industri ke lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa. Peningkatan penduduk yang bekerja di lapangan usaha perdagangan dan jasa dapat diartikan bahwa kedua lapangan usaha ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Grafik 4.8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015

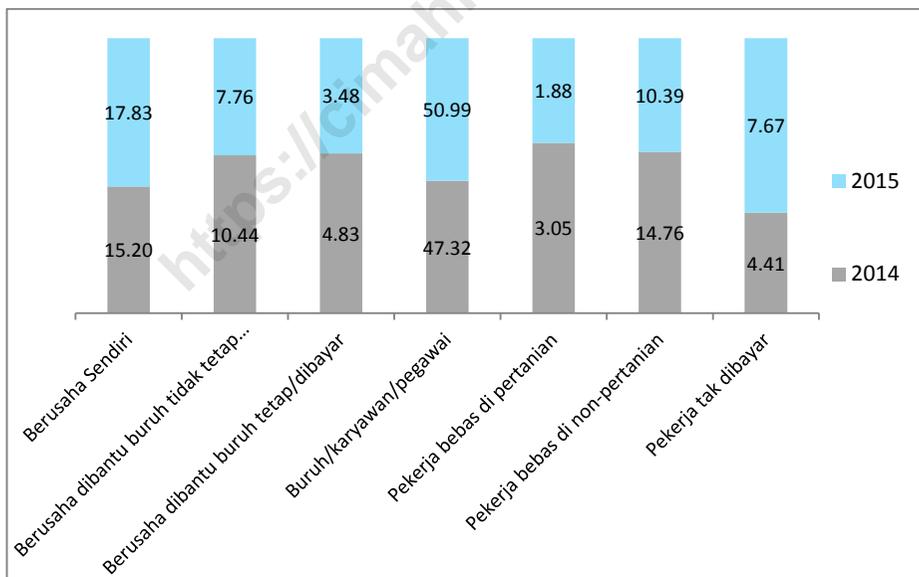


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014-2015

Selama periode Agustus 2014 hingga Agustus 2015 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada Agustus 2015 mencapai 153.690 orang atau sebesar 50,99 persen. Bila dibandingkan dengan Agustus 2014 mengalami peningkatan sebanyak 3,67 persen.

Peningkatan juga terjadi pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja tak dibayar. Peningkatan yang terjadi masing-masing sebesar 2,63 persen dan 3,26 persen dibandingkan Agustus 2014. Sedangkan untuk status pekerjaan utama lainnya mengalami penurunan.

Grafik 4.9 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2014-2015

4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*)

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah

Survei Sektor Informal 2014, BPS).

Tabel 4.3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2014 – 2015

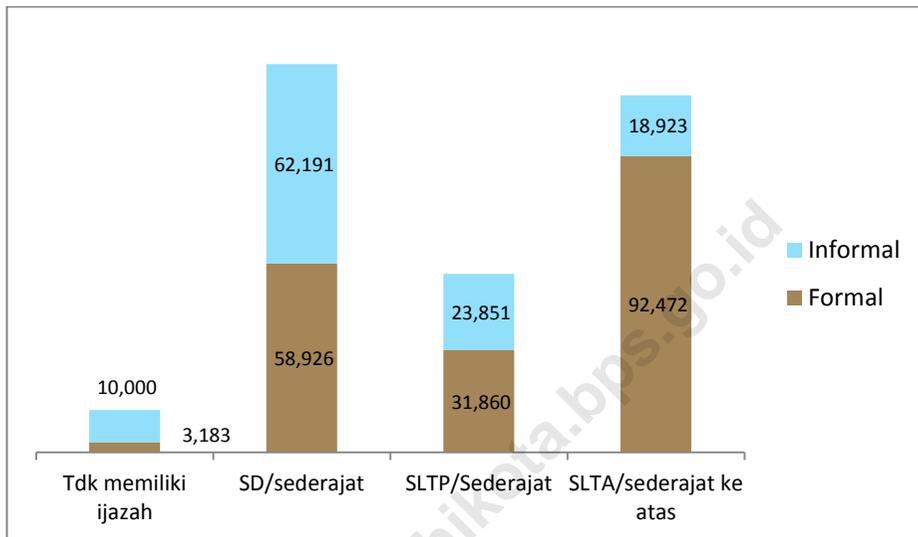
Jenis Pekerja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Pekerja Formal	165,830 (60,52%)	186,441 (61,86%)
Pekerja Informal	108,171 (39,48%)	114,965 (38,14%)
Total	274,001 (100%)	301,406 (100%)

Sumber : Sakernas Agustus 2014 - 2015

Penduduk Kota Cimahi yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal selama periode 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada keadaan Agustus 2014 jumlah penduduk bekerja pada sektor formal mencapai 165.830 orang dan pada Agustus 2015 meningkat 186.441 orang. Sedangkan pada sektor informal pada kondisi Agustus 2014 sebanyak 108.171 orang menjadi 114,965 orang pada kondisi Agustus 2015.

Namun jika dilihat dari persentase pada tiap tahunnya, terjadi pergeseran dimana sektor formal mengalami peningkatan dari 60,52 persen menjadi 61,86 persen. Sebaliknya sektor informal mengalami penurunan dari 39,48 persen menjadi 38,14 persen.

Grafik 4.10 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Status Kegiatan Formal Informal di Kota Cimahi, Agustus 2015



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Kota Cimahi Agustus 2015

Keterlibatan penduduk dalam dunia pekerjaan cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki kecenderungan seseorang untuk bekerja pada sektor formal. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015, sebanyak 92.472 orang penduduk bekerja berijazah SLTA ke atas bekerja pada sektor formal. Kemudian sebanyak 96.042 orang penduduk bekerja berijazah SLTP ke bawah bekerja pada sektor informal.

5 Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016

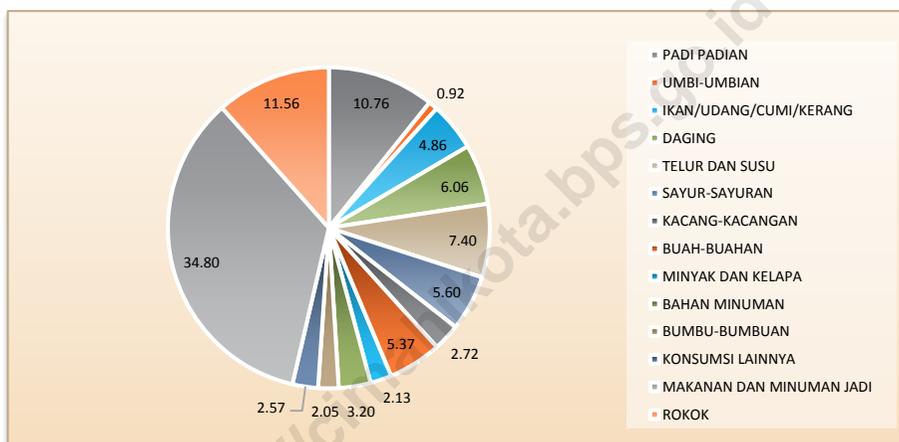
Golongan Pengeluaran (rupiah)	Kelompok Barang		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 300.000	158.185,90	106.256,31	264.442,21
300.000 – 499.999	220.351,04	182.444,62	402.795,67
500.000–699.999	342.968,74	300.300,49	643.269,23
700.000–899.999	382.415,65	426.203,75	808.619,40
> 900.000	758.916,23	1.212.162,30	1.971.078,52
Rata-rata	502.010,92	695.584,28	1.197.595,20

Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2016

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Cimahi sebesar Rp. 1.197.595,20 yang dibagi menjadi Rp. 502.010,92 untuk makanan dan Rp. 695.584,28 untuk bukan makanan. Jika dilihat berdasarkan golongan pengeluaran, golongan pengeluaran di bawah Rp. 900.000,00 dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih banyak digunakan untuk makanan. Sedangkan untuk golongan pengeluaran di atas Rp. 900.000,00 pengeluaran bukan makanan lebih besar dari pengeluaran makanan. Grafik

5.1 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang.

Grafik 5.1 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016



Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2016

Jika kelompok makan dirinci menurut sub kelompoknya, terlihat pada tabel 5.2 bahwa sub kelompok makanan dan minuman jadi kondisi Maret 2016 menjadi sub kelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi dibandingkan sub kelompok lainnya yaitu Rp. 174.710,88. Diikuti sub kelompok tembakau dan sirih sebesar Rp. 58.013,00 dan padi-padian sebesar Rp. 54.006,74. Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota Cimahi banyak mengkonsumsi makanan jadi, perlu menjadi dukungan pemerintah dengan didirikan pusat kuliner makanan khas Kota Cimahi sebagai salah satu penunjang pendapatan kota Cimahi.

Tabel 5.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Kelompok Makanan Sebulan Menurut Sub Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2016

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
(1)	(2)
Padi-padian	54.006,74
Umbi-umbian	4.604,13
Ikan	24.417,75
Daging	30.404,61
Telur dan susu	37.127,60
Sayur-sayuran	28.122,18
Kacang-kacangan	13.639,51
Buah-buahan	26.961,88
Minyak dan lemak	10.716,02
Bahan minuman	16.088,20
Bumbu-bumbuan	10.301,06
Konsumsi lainnya	12.897,37
Makanan dan minuman jadi	174.710,88
Tembakau dan sirih	58.013,00
Jumlah	502.010,92

Sumber : Susenas Modul Konsumsi, Maret 2016

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil

pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Grafik 5.2 Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2012 – 2016



Sumber : Tabel Dinamis Gini Rasio Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari grafik 5.2, indeks gini Kota Cimahi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016 0,42 dari 0,40 pada tahun 2015. Namun tahun 2016 kembali turun menjadi 0,42. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi ada pada tingkat ketimpangan sedang.

6. Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Data hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan adanya penurunan walaupun sangat sedikit. Pada tahun 2016, rumah yang berlantaikan bukan tanah sebesar 99,71 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 99,99 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan, 2015 dan 2016

Indikator	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah	%	99,99	99,71
Atap beton, genteng dan asbes	%	99,86	99,28
Dinding terluas tembok dan kayu	%	98,78	98,89
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	m^2	71,62	70,17

Sumber : Susenas, 2016

Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2015 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes mencapai 99,86 persen dan pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 99,28 persen tetapi kondisi sebaliknya terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu yang naik dari 98,78 persen menjadi 98,89 persen pada tahun 2016.

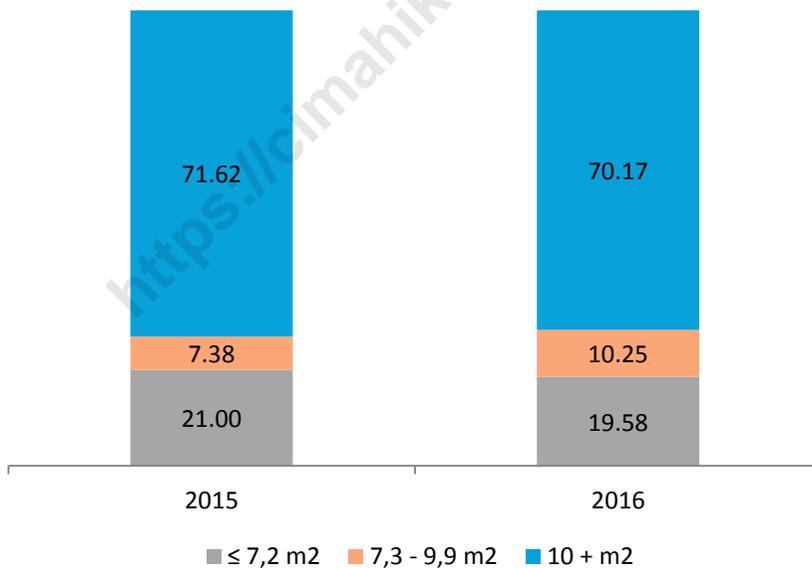
Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Data hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan bahwa di Kota Cimahi persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² adalah sebesar 70,17 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015, maka terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² yang mencapai 1,45 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang belum seimbang dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat untuk

memperoleh rumah yang lebih sesuai dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita di Kota Cimahi dapat dilihat pada Grafik 6.1. Berdasarkan Grafik tersebut terlihat terjadi penambahan persentase rumah tangga dengan luas lantai $\leq 10 \text{ m}^2$ dari tahun 2015 ke tahun 2016. Penambahan persentase terbanyak pada luas lantai per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$.

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2015 dan 2016



Sumber : Susenas, 2016

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 6.2. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan,
Tahun 2015 -2016**

Indikator	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan, air isi ulang & ledeng	%	67,76	66,87
Air minum bersih *)	%	81,01	81,25
Jamban sendiri	%	73,35	73,10
Jamban sendiri dengan tangki septik	%	48,78	63,67
Sumber penerangan listrik PLN	%	98,98	99,08
*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan *(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 m+			

Sumber : Susenas, 2016

Rumah tangga di Kota Cimahi tahun 2016 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak

mencapai 66,87 persen. Terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sebesar 66,87 persen. Peningkatan ini terjadi selain karena semakin banyak pilihan merek air kemasan, berjamurnya depot-depot air minum isi ulang juga karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kesehatan khususnya dalam konsumsi air minum.

Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2016 mencapai 81,25 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2015-2016 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sedikit menurun dari 73,35 persen menjadi 73,10 persen. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah

mencapai 63,67 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 48,78 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan bahwa 99,08 persen rumah tangga di Kota Cimahi telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN. Dengan angka ini bisa dikatakan hampir seluruh masyarakat Kota Cimahi sudah menikmati fasilitas listrik dari PLN.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 58,34 persen, sisanya 41,66 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 24,22 persen kontrak/sewa dan 17,44 persen bebas sewa/rumah dinas/lainnya.

**Tabel 6.3. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal,
2015 -2016**

Indikator	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	60,43	58,34
Kontrak/Sewa	%	22,65	24,22
Bebas Sewa/Rumah Dinas/lainnya	%	16,92	17,44

Sumber : Susenas, 2016

Jika kita amati status kepemilikan rumah pada periode 2015 – 2016, maka dapat kita lihat bahwa rumah tinggal yang milik sendiri mengalami penurunan sebesar 2,09 persen. Akan tetapi, terjadi peningkatan pada rumah tinggal yang bebas sewa/rumah dinas/lainnya sebesar 1,57 persen. Begitu juga dengan status kepemilikan rumah tinggal yang kontrak/sewa pada periode tersebut juga meningkat yaitu sebesar 0,52 persen.

7 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga

membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari

\$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2010-2016 (keadaan bulan Maret). Tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebesar 131,60 ribu jiwa atau 20,71 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Cimahi. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada Maret tahun 2016 jumlah penduduk miskin sudah berkurang menjadi 102,79 ribu jiwa atau 15,60 persen dari jumlah penduduk.

Grafik 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2011-2016
(Maret, Ribuan Orang)



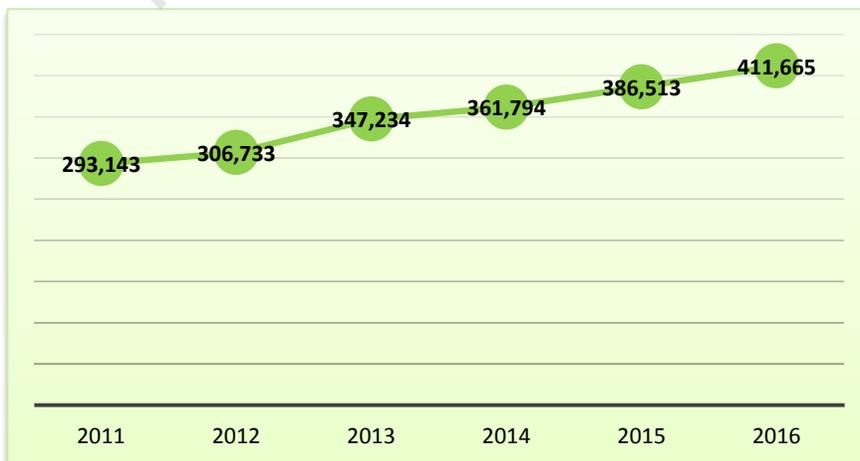
Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2011-2016, tahun 2010 sebesar Rp 263.177 dan di tahun 2016 sebesar Rp 397.215.

Grafik 7.2 Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2011 - 2016
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2011 – 2016 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2011 sebesar 0,91, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,14, kemudian tahun 2013 kembali menurun menjadi 1,09. Setelah itu selama periode 2014 – 2016 indeks kedalaman kemiskinan Kota Cimahi terus mengalami penurunan dengan nilai 0,89, turun menjadi 0,91, dan 0,71. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi
2011 - 2016**



Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 – 2012 meningkat, periode 2013 – 2016 mengalami penurunan dari 0,21 menjadi 0,21, dan 0,14. Penurunan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 7.4 Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2013 - 2016



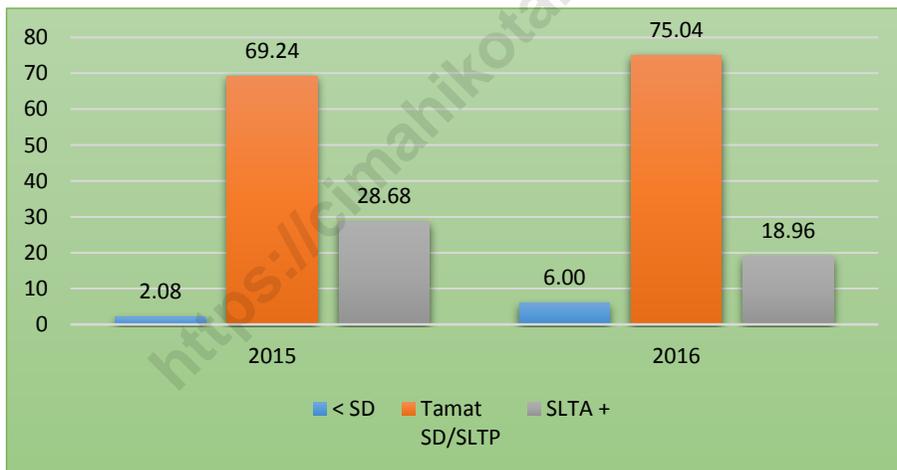
Sumber : Indikator Kemiskinan Kota Cimahi

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan

memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Grafik 7.5 Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2015 - 2016



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016, BPS

Persentase penduduk miskin di Kota Cimahi menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2016 menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 75,04 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 6,00 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD. Adapun penduduk miskin yang pendidikannya tamat SLTA/sederajat atau lebih mencapai 18,96 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat

pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka terlihat adanya penurunan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTA ke atas, dimana pada tahun 2015 sebesar 28,68 persen penduduk miskin yang tamat SLTA ke atas, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 18,96 persen.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 54,57 persen pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen yaitu dari 53,12 persen menjadi 54,57 persen.

Grafik 7.6 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2015 - 2016



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016, BPS

Berkurangnya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tentunya berpengaruh pada peningkatan penduduk yang bekerja. Dari 35,07 ribu penduduk miskin pada tahun 2016, sebanyak 1,18 persen bekerja pada sektor informal dan 44,25 persen bekerja pada sektor formal. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja yaitu dari 53,12 persen pada tahun 2015 menjadi 54,57 persen pada tahun 2016.

Grafik 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2015 – 2016



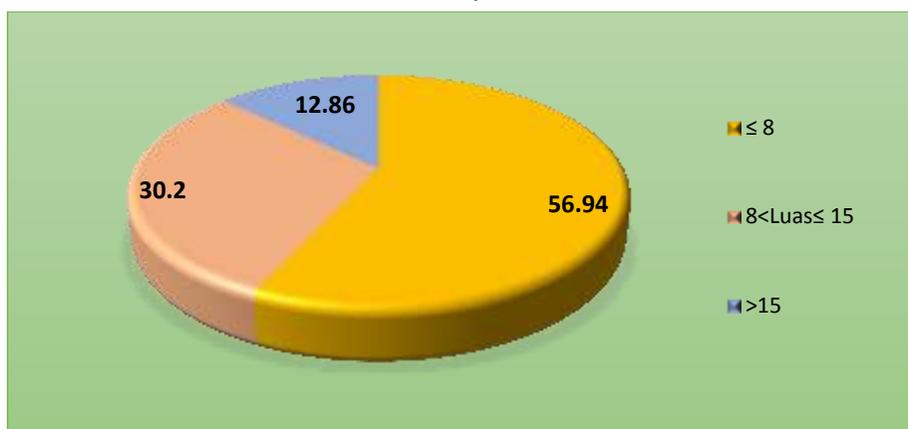
Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016, BPS

Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2016 mencapai 1,18 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,48 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin bersaingnya lapangan pekerjaan formal sehingga banyak pekerja masyarakat beralih ke sektor pertanian, Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase penduduk yang bekerja bukan disektor pertanian yang sebesar 46,18 persen pada tahun 2015, menurun menjadi 44,25 persen pada tahun 2016.

7.5 Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah perumahan. Rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang besar. Jika dihubungkan dengan luas lantai per kapita, setiap anggota rumah tangga miskin memiliki ruang gerak yang terbatas. Kondisi ini ditunjukkan oleh persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai per kapita di atas 15 meter persegi yang masih rendah. Adanya keterbatasan untuk leluasa melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding mereka yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010). Pada tahun 2015, sebesar 56,94 persen rumah tangga memiliki luas lantai perkapita kurang dari 8 meter persegi. Sedangkan rumah tangga miskin yang memiliki luas lantai perkapita lebih dari 15 meter persegi hanya sebesar 30,20 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin kualitas hidup masih rendah jika dilihat dari keleleasaanya dalam beraktivitas di dalam rumah.

Grafik 7.8 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Perkapita di Kota Cimahi, Tahun 2015



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015, BPS

Ketersediaan fasilitas air minum dan jamban juga merupakan diantara karakteristik perumahan yang perlu mendapat perhatian. Di Kota Cimahi, persentase rumah tangga miskin yang mengakses air layak mencapai 77,32 persen pada tahun 2016. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung (<https://sirusa.bps.go.id>).

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010).

Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Kota Cimahi relatif belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama hanya sebesar 36,44 persen pada tahun 2016.

7.6 Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi meringankan beban rumah tangga miskin, di antaranya pemberian subsidi pada beras murah Raskin (Beras Miskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat digunakan untuk berobat.

Tabel 7.1 Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kota Cimahi, 2015-2016

Uraian	Satuan	2015	2016
Rumah tangga penerima raskin	%	24,36	84,40
Rata-rata raskin	Kg	5,83	5,81
Rata-rata harga	Rp	2.617	1.962

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kecamatan Tahun 2015-2016, BPS

Persentase rumah tangga miskin yang menerima raskin pada tahun 2015 mencapai 24,36 persen, kemudian meningkat tajam pada tahun 2016 menjadi 84,40 persen. Namun Rata-rata beras raskin yang diterima mengalami penurunan, dari 5,83 kilogram pada tahun 2015 menjadi 5,81 kilogram pada tahun 2016. Demikian juga harga beras raskin per kilogram yang dibayar rumah tangga miskin sedikit mengalami penurunan dari Rp. 2.617 per kilogram menjadi Rp. 1.962 per kilogram.

8 Sosial Lainnya

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi. Cakupan pembahasan meliputi data Perjalanan Wisata Penduduk, Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis serta Korban Tindak Kejahatan.

Pengertian perjalanan wisata yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Selanjutnya akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat

dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata.

Grafik 8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan, Tahun 2015-2016



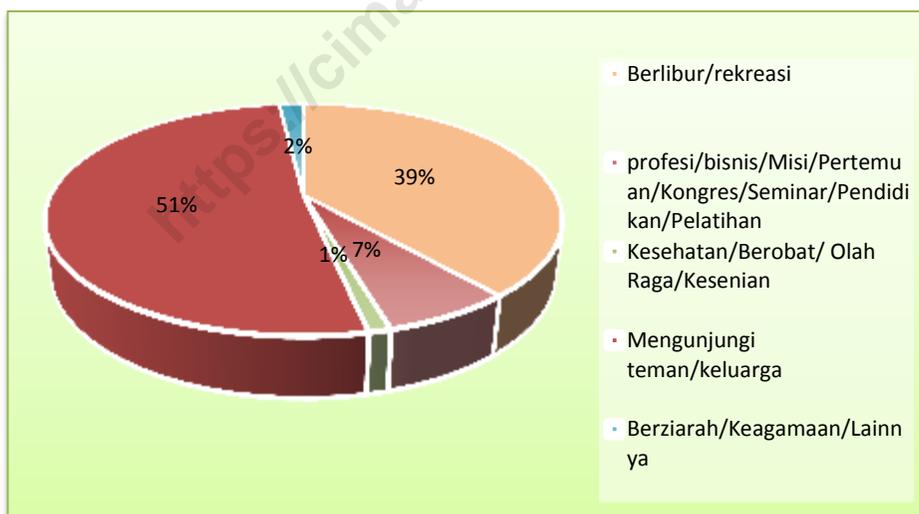
Sumber : Susenas, 2016

Selama tahun 2015 dan 2016 jumlah penduduk Perempuan lebih banyak melakukan perjalanan dibandingkan penduduk laki-laki. Persentase penduduk Perempuan yang melakukan perjalanan wisata pada tahun 2016 sebesar 23,23 persen, untuk penduduk laki-laki sebesar 22,34 persen.

Sementara itu jika dilihat secara total, maka persentase penduduk Kota Cimahi yang melakukan perjalanan selama tahun 2016 sebesar 22,78 persen.

Apabila dilihat berdasarkan maksud utama melakukan bepergian maka persentase terbesar adalah untuk berlibur/rekreasi yaitu sebesar 51,40 persen kemudian untuk mengunjungi teman/keluarga sebesar 38,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cimahi cukup memperhatikan kebutuhan rohani yaitu dengan melakukan rekreasi dan juga mengunjungi teman/saudara. Sedangkan persentase terkecil yaitu untuk tujuan kesehatan/ berobat/ olah raga/ kesenian hanya sebesar 1,16 persen.

Grafik 8.2. Persentase Penduduk yang Melakukan Kegiatan Bepergian Menurut Maksud Utama Melakukan Bepergian Tahun 2016



Sumber : Susenas, 2016

8.2. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau

telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Secara umum persentase rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 9,57 persen di tahun 2016, menurun 2,21 persen dibandingkan tahun 2015.

Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN Tahun 2016



Sumber : Susenas 2015 dan Susenas 2016

Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Di tahun 2016 penggunaan telepon seluler meningkat 5,46 persen dibandingkan tahun 2015, dari 74,40 persen menjadi 79,86 persen.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2015 dan 2016

Indikator	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Seluler	%	74,40	79,86
Akses Internet	%	43,72	43,92

Sumber : Susenas 2015 dan Susenas 2016

Selanjutnya terkait penggunaan telepon Seluler, berdampak pada kemudahan akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2016 penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet sebesar 43,92 persen. Nilai ini meningkat sebesar 0,20 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015.

8.3 Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Kredit usaha yang diterima oleh masyarakat akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberian kredit usaha ini akan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Program-program kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

Selain itu pula terdapat Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi).

Pada tahun 2016 rumah tangga penerima kredit usaha turun sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 10,20 persen pada tahun 2015 menjadi 9,87 persen pada tahun 2016.

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, persentase rumah tangga penerima jaminan pelayanan Kesehatan meningkat 6,37 persen, dari 44,92 persen di tahun 2015 menjadi 51,29 persen di tahun 2016. Diharapkan dengan meningkatnya rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi. Dengan meningkatnya derajat kesehatan diharapkan kapabilitas masyarakat untuk bisa hidup sejahtera juga akan meningkat.

Tabel 8.4. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, 2015 dan 2016

Indikator	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha	%	10,20	9,87
Rumah Tangga Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	44,92	51,29

Sumber : Susenas, 2016

8.4. Tindak Kejahatan

Tingkat keamanan di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase korban tindak kejahatan yang tinggi mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2016 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan.

Pada periode tahun 2016, penduduk Kota Cimahi yang menjadi korban kejahatan turun sebesar 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dipilah menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih besar dibanding perempuan. Laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,96 persen, sedangkan perempuan sebesar 0,87 persen.

Grafik 8.4. Persentase penduduk Menjadi Korban Kejahatan Sejak Maret 2014 – Februari 2016



Sumber : Susenas, 2016



KERJA BERSAMA DENGAN DATA

<https://cimahikota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA CIMAHI
Jl. Entjep Kartawiria No. 20B Citeureup
Cimahi 40512
Telp./Fax: (022) 6645985.
e-mail: bps3277@bps.go.id
website : cimahikota.bps.go.id